

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 yang menyangkut sasaran dan tujuan serta kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Januari 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG



APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si
PANGBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600723 198011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Umum	1
B Gambaran Umum InspektoratKabupaten Sintang	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	12
A Visi dan Misi	12
B Tujuan dan Sasaran	12
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019	14
A Program dan Kegiatan 2019	14
B Indikator dan Target Kinerja Tahun 2016 - 2021.....	16
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan maksud untuk menetapkan tingkat capaian kinerja/target yang diinginkan dari berbagai kegiatan tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Melalui Rencana Kinerja Tahunan ini akan menggambarkan kegiatan-kegiatan serta target-target yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.
2. Agar dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja Aparatur.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; yang mewajibkan integrasi dari sistem akuntabilitas kinerja dan sistem penganggaran serta penerapan anggaran berbasis kinerja pada seluruh instansi pemerintah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 108 Tahun 2000 yang mewajibkan daerah untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja dan mempertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- n. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

3. Keterkaitan RENSTRA, RKT dan LKjIP

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan merupakan aplikasi lebih lanjut dari Renstra dalam bentuk komitmen penetapan target kinerja dari berbagai kegiatan yang ingin dicapai oleh organisasi dan selanjutnya dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sintang

1. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Memperhatikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang, Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi

Lebih lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Perangkat daerah dan desa;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (MPPKN/N) dan Kesekretariatan Majelis Perimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Derah (MPPKN/MPPKD);
7. Pengoordinasian kesekretariatan, Inspektur pembantu, dan Auditoriat;
8. Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
9. Penanganan pengaduan masyarakat;

10. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
12. Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan evaluasi jabatan;
13. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
14. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Umum;
 - b. Sub bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub bagian Monitoring dan Evaluasi;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Hal-hal Lain Yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang terdapat beberapa hal yang berpengaruh sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1) Dari segi kepangkatan / golongan ruang, terdiri dari :

- Golongan I : - orang
- Golongan II : 2 orang
- Golongan III : 44 orang
- Golongan IV : 20 orang

2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari :

- S2 : 16 orang

- S1 : 44 orang
- D3 : 2 orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari :

- SPAMEN / Pim II : 1 orang
- SPAMA / Pim III : 3 orang
- ADUM / Pim IV : 10 orang

4). Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 37 orang dari Jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor Sebanyak 34 Orang, dengan rincian :

- Auditor Ahli Pengendali Teknis : 9 orang
- Auditor Ahli Ketua Tim : 20 orang
- Auditor Ahli Anggota Tim : 4 orang
- Auditor Trampil Anggota Tim : 1 orang

Adapun rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Auditor Ahli terdiri dari :

- Auditor Utama : - orang
- Auditor Madya : 9 orang
- Auditor Muda : 20 orang
- Auditor Pertama : 4 orang

Auditor Trampil :

- Auditor Penyelia : 1 orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : - orang
- Auditor Pelaksana : - orang

5) Dari segi pegawai yang telah memegang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebagai berikut :

- P2UPD Tingkat Utama : - orang
- P2UPD Tingkat Madya : 5 orang

- P2UPD Tingkat Muda : 5 orang
- P2UPD Tingkat Pertama : 2 orang

6) Dari segi Jabatan Struktural / Eselon sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 3 orang
- Eselon IV : 2 orang

ii. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang tentu harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain :

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	
1.	Tanah Bangunan Kantor	9.706	M ²
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	5	Unit
3.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	a. Alat Angkutan		
	- Mobil	3	Buah
	- Sepeda Motor	47	Buah
	b. Alat Pertanian	-	Unit
	c. Alat Studio dan Komunikasi	2	Unit
	d. Alat Ukur	6	Unit
	e. Alat Pengaman	-	Unit
	f. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.192	Unit
	g. Instalasi	1	Unit
4.	Jalan dan Jaringan	6	Unit
5.	Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan)	22.228	Buah
6.	Alat Pengaman Kebakaran	-	Tabung
7.	Jaringan Air Bersih	1	Unit
8.	Papan Nama Nomenklatur	1	Buah
9.	SIM-HP	6	Unit

iii. Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang menjadi wewenang Inspektorat Kabupaten Sintang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

iv. Lingkup Pengawasan

Agar tugas-tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara tertib dan penuh tanggung jawab, maka yang menjadi lingkup pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

1) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai tugas membina dan mengawasi pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan I;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, desa dan tugas pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa;
- c. Penyusunan pedoman / standar dan petunjuk teknis pengawasan Bidang Pengawasan I;
- d. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi asistensi dan konsultasi pengawasan;
- f. Pelaksanaan pengawasan umum. operasional, tugas dan fungsi atau kinerja Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
- g. Pemeriksaan, pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan I
- h. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

2) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan II;
- b. Pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring/pemantuan evaluasi, dan tugas pengawasan lainnya sesuai Peraturan peundang-undangan;
- d. Penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis di Bidang Pengawasan II;
- e. Pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tugas dan fungsi atau kinerja Dinas, Badan dan Kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- h. Pemeriksaan, Pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang pengawasan II;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan reviu hasil pengawasan;
- j. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan II;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya'

3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan III;
- b. Pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan bidang Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi;
- c. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Pemantauan perwujudan dan pelaksanaan Zona Integritas (ZI);
- e. Pengawasan dan pengendalian laporan Gratifikasi.
- f. Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Penangan Whistle Blowing System;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- i. Penangan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Nrgara (LHKASN);
- j. Pemantauan Penerapan Fakta Integritas;
- k. Penyelenggaraan Strategi Nasional Pencegahan dan Aksi Pemberantasan Korupsi;
- l. Penyusunan Pedoman/Standar dan petunjuk teknis pengawasan Bidang Pengawasan III;
- m. Pelaksanaan Pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- n. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- o. Pengawasan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan kasus disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- p. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- q. Pengawasan Strategi pencegahan dan penindakan korupsi serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- r. Pemeriksaan, pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan III;
- s. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan III;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Khusus dan Investigatif;

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan IV
- b. Pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan Bidang IV;
- c. Pelaksanaan Audit/pemeriksaan, monitoring/pemantauan, evaluasi, revidu dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan Bidang Khusus dan Investigatif;
- e. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi kerugian Negara/Daerah yang berindikasi pidana korupsi;
- h. Pemeriksaan khusus atas perintah Bupati, permintaan Kepala Perangkat Daerah dan akhir masa jabatan;
- i. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan investigatif;
- k. Pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga-lembaga lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan

pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik atau Aparat Penegak Hukum (APH);

- l. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- m. Pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang IV;
- n. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan IV;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Lingkup dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terbentuk 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 19 (sembilan belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 14 (empat belas) Kantor Camat, 16 (enam belas) Kelurahan, dan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa yang merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang masih menggunakan Renstra tahun 2017-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program yang akan dicapai.

Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mendukung terlaksananya Pemerintahan yang baik (Good Governance).

A. VISI dan MISI

1. VISI

Visi Inspektorat Kabupaten Sintang adalah, “ **Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera** ”. Rumusan visi di atas dapat dideskripsikan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati.

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Inspektorat Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan dan menetapkan misi sesuai Misi Kabupaten, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari MISI atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan Kapabilitas APiP;
- b. Peningkatan kualitas Pengawasan dan tindak lanjut Pengawasan
- c. Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi

2. Sasaran

Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan;
- b. Meningkatnya jumlah Regulasi / Kebijakan pengawasan yang diterbitkan;
- c. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan;
- d. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala;
- e. Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- f. Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD
- g. Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

A. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan’
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Sedangkan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah;
- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas;

- Penyediaan Tenaga Kontrak;
- Penataan Dokumen Arsip;
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;
- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
- Pengadaan meubeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Pengadaan perangkat komputer dan printer;
- Pemeliharaan Rutin perangkat komputer dan printer;
- Pengadaan Alat Ukur;
- Pembangunan Jalan Gedung Kantor;
- Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan Renja SKPD;
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan, dan kelurahan;
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah;
- Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut;
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya;
- Inventarisasi temuan pengawasan;
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
- Audit Alokasi Dana Desa;
- Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
- Evaluasi LAKIP;
- Pemeliharaan program SIM-HP;
- Inventarisasi Penetapan TPTGR;

- Reviu RKA SKPD;
- Pencanangan Zona Integritas;
- Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Probitiy Audit;
- Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- Penanganan Laporan Gratifikasi;
- Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP;
- Audit Manajemen Kepegawaian;
- Audit Tata Kelola Teknologi Informasi;
- Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N!);
- Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Audit Alokasi Dana Khusus (DAK) Fisik TA 2019;
- Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan;
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturngawasan;
- Pelaksanaan Penguatan Kapabilitas APiP;
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan;
- Pameran Pembangunan;

B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2017-2021

Dalam Rencana Kinerja termuat Indikator Kinerja serta target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

1. Kinerja Sasaran

Dalam upaya mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari kinerja sasaran yang memuat indikator kinerja, target kinerja sasaran serta target anggarannya.

a. Sasaran I

Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 1			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawasan	a. Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional) b. Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti Diklat Teknis dan Kapabilitas Sumber daya Aparatur Pengawasan.	49 org 60 PFTT 14 PFU

b. Sasaran II

Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan pengawasan yang diterbitkan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 2			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	Jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan	2 Regulasi

c. Sasaran III

Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 3			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Penyelesaian Tindak	Prosentase Jumlah	80 %

	lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.	Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.	
--	----------------------------------	--	--

d. Sasaran IV

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019, ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 4			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan berkala yang diperiksa	125 obrik

e. Sasaran V

Meningkatnya Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 5			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.	Jumlah Kasus/ Khusus yang diperiksa.	60%

f. Sasaran VI

Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 6			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	a. Jumlah SKPD yang di evaluasi b. Jumlah SKPD dengan nilai ,SAKIP berkatagori baik	100 % 35 SKPD

g. Sasaran VII

Meningkatnya Pelayanan SKPD yang Bebas Korupsi

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2019 ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

SASARAN 7			
No	Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)
	1	2	3
1	Meningkatnya Pelayanan SKPD yang Bebas Korupsi	a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP b. Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT c. Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM d. Jumlah Laporan LHKPN/LKHASN yang disusun	43 SKPD 43 SKPD 4 SKPD 90%

2. Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan merupakan hasil yang dicapai dari suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi.

Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan diperlukan tolak ukur maupun indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan yang dimaksud.

Dalam rencana kinerja, indikator kegiatan yang dipergunakan meliputi:

- Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar program/kegiatan dapat berjalan.
- Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang merupakan produk dari suatu kegiatan.

- Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Adapun indikator dan target kinerja kegiatan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam "Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT)".

3. Pengukuran capaian kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana atau target dengan realisasi kinerja. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) *Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus*

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- (2) *Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

BAB IV

PENUTUP

Dalam mengaplikasikan lebih lanjut Renstra sebagai rencana jangka menengah (lima tahun) maka disusunlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penerapan RKT ini diharapkan dapat memberikan arah bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam mewujudkan VISI dan MISI melalui kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan capaian kinerja yang ingin dicapai serta memperhitungkan sumber daya yang ada.

Anggaran yang tersedia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.789.676.891,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.819.993.091,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.969.683.800,00. Dengan anggaran yang tersedia diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, keberadaan Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai salah satu rangkaian perencanaan diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena melalui Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dari program/kegiatan yang dilakukan, sehingga apabila terdapat kelemahan dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengalami kegagalan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Instansi : Inspektorat Kabupaten Sintang

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN				
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang tertib	- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan.	100%	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	Input - Dana tersedia Output - Materai - Paket Pengiriman - Buku Cek Outcomes tersedianya materai dan perangko dan Buku Cek yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Rupiah Lembar kg buah %	8,750,000.00 500 150 5 100
					2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Input - Dana tersedia Output - Rekening telpon - Rekening air - Rekening listrik - Rekening Internet Outcomes - Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, listrik dan Internet	Rupiah Bulan Bulan Bulan Bulan %	122,398,800.00 12 12 12 12 100
					3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.	Input - Dana tersedia Output - STNK dan BPKB mobil - STNK dan BPKB	Rupiah Unit Unit	14,515,000.00 3 47

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							motor		
							Outcomes	%	100
						- Tersedianya surat-surat kendaraan dinas			
					4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Input		
						- Dana tersedia	Rupiah		3,614,755.00
						Output			
						- Bahan kebersihan	Jenis		12
						-			
						Outcomes			
						- Tersedianya bahan kebersihan	%		100
					5.	Penyediaan alat tulis kantor.	Input		
						- Dana tersedia	Rupiah		80,911,375.00
						Output			
						- Tersedianya ATK	Jenis		25
						Outcomes			
						- Tersedianya ATK	%		100
					6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Input		
						- Dana tersedia	Rupiah		47,256,470.00
						Output			
						- barang cetakan	Jenis		2
						- barang penggandaan	lembar		1
						Outcomes			
						- tersedianya barang cetakan dan penggandaan	%		100
					7.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	Input		
						- Dana tersedia	Rupiah		3,091,200.00
						Output			
						- alat listrik	Jenis		4
						-			
						Outcomes			
						- Terpenuhinya alat	%		100

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							listrik		
					8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Input - Dana tersedia Output - surat kabar Outcomes - Tersedianya surat kabar	Rupiah (penerbit x365 hari) %	6,780,000.00 2 100
					9.	Penyediaan makanan dan minuman.	Input - Dana tersedia Output - Makanan - Snack Output - Tersedianya makanan dan minuman	Rupiah jenis jenis %	33,561,600.00 1 1 100
					10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input - Dana tersedia Output - rapat koordinasi ke luar Kabupaten - rapat koordinasi ke luar provinsi Outcomes - Terpenuhinya rakor kerja sebagai penunjang kelancaran tugas	Rupiah jenis jenis %	687,976,000.00 1 1 100
					11	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah.	Input - Dana tersedia Output - rapat-rapat koordinasi dalam daerah Outcomes - Terpenuhinya rakor	Rupiah Kali %	21,980,000.00 11 100

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Jumlah gedung yang dipelihara	unit	1
							Outcomes		
					3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	- Gedung kantor yang menunjang tugas	%	100
							Input		
							- Dana tersedia	Rupiah	52,500,000.00
							Output		
							- Pemeliharaan mobil	Unit	3
							Outcomes		
							- Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 4	%	100
					4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Input		
							- Dana tersedia	Rupiah	18,100,000.00
							Output		
							- Pemeliharaan perlengkapan	Unit	25
							Outcomes		
							- Perpeliharanya perlengkapan	%	100
					5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input		
							- Dana tersedia	Rupiah	600,000.00
							Output		
							- Peliharaan Mesin Air	Unit	1
							Outcomes		
							- Terpeliharanya peralatan kantor	%	100
					6.	Pengadaan perangkat komputer dan printer.	Input		
							- Dana tersedia	Rupiah	211,255,000.00
							Output		
							- Lap Top	Unit	7
							- Printer	Unit	6
							- PC	Unit	1
							- Scanner	Unit	2

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						7.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcomes Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien Input Dana tersedia Output AC GPS Alat Ukur Outcomes Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Dana tersedia Output Peliharaan Komputer Peliharaan Note Book Peliharaan Perinter Outcomes Terpeliharanya peralatan komputer dan Printer	% Rupiah Unit Unit Unit % Rupiah Unit Unit Unit %	100 132,000,000.00 3 1 3 100 37,250,000.00 5 15 14 100
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	100%	3 Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas	Input Dana tersedia Output Jumlah Pakaian Dinas Outcomes Meningkatnya Disiplin PNS Dalam Berpakaian	Rupiah Stel %	105,945,000.00 70 100	

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya kualitas dan Kemampuan PNS	-	100%	4 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input Dana tersedia Output Pegawai yang mengikuti Diklat Outcomes Meningkatnya Kemampuan PNS yang mengikuti Diklat agar dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur	Rupiah Orang %	308,437,500.00 13 100
					2.	Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional APIP	Input - Dana tersedia Output - Jumlah DUPAK Outcomes - Tersedianya Laporan DUPAK APIP	Rupiah Orang %	30,941,500.00 43 100
5	Pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan	- Penyusunan laporan keuangan	100%	5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Input Dana tersedia Output Laporan Capaian Kinerja	Rupiah Dokumen	3,840,700.00 1
					2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Input - Dana tersedia Output - Laporan keuangan akhir tahun Outcomes - Tersedianya data keuangan akhir tahun	Rupiah Dokumen %	3,220,200.00 1 100
					3	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Input - Dana tersedia Output	Rupiah	3,366,900.00

SASARAN				KEGIATAN						
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						4	Penyusunan RENJA SKPD	- Laporan keuangan Semestrian Outcomes - Tersedianya data keuangan Semesteran Input - Dana tersedia Output - Laporan RENJA SKPD Outcomes - Tersedianya data RENJA SKPD	Dokumen % Rupiah Dokumen %	1 100 3,220,200.00 1 100
						5	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	- Dana tersedia Output - Laporan Program Pengawasan Outcomes - Tersedianya data dan program Pengawasan	Rupiah Dokumen %	4,126,700.00 1 100
6	Terlaksananya pemeriksaan operasional dan pelayanan masyarakat.	Meningkatnya Jumlah Obrik yang diperiksa	100%	6 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada sekretariat, kecamatan dan kelurahan	Input Dana tersedia Output Jumlah objek pengawasan Outcomes Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah LHP %	174,060,000.00 12 100	
					2.	Pelaksanaan	Input			

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengawasan internal secara berkala pada dinas dan LTD	- Dana tersedia Output - Jumlah objek pengawasan Outcomes - Tercapainya program kerja pengawasan sesuai PKPT	Rupiah Objek %	427,235,000.00 38 100
					3.	Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut	Input - Dana tersedia Output - Jumlah objek pengawasan Outcomes - Meningkatnya Jumlah Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	Rupiah LHM %	360,580,000.00 35 100
	Terlaksananya pemeriksaan kasus dan khusus.	- Meningkatnya penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat, pimpinan SKPD dan perintah Bupati.	100%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.	Input - Dana tersedia Output - Jumlah kasus yang tertangani	Rupiah Kasus	764,780,000.00 20
					5.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya.	Input - Dana tersedia Output - Jumlah kasus yang tertangani Outcomes - Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus.	Rupiah LHP %	72,331,700.00 1 100
					6.	Inventarisasi temuan pengawasan.	Input - Dana tersedia	Rupiah	259,871,680.00

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Output - Terlaksananya Inventarisasi temuan pengawasan Outcomes - Tersedianya data temuan yang telah diinventarisasi	Kali %	5 100
	Terlaksananya pemeriksaan TUPOKSI dan proyek.	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.	100%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.	Input Dana tersedia Output Jumlah proyek yang dapat dievaluasi Outcomes Tersedianya data fisik proyek	Rupiah SKPD %	100,565,000.00 4.00 100.00
					8.	Audit Alokasi Dana Desa.	Input - Dana tersedia Output - Laporan pemeriksaan keuangan ADD Outcomes - Meningkatnya pengawasan terhadap ADD Desa	Rupiah LHP %	487,730,000.00 21 100
					9.	Review laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.	Input - Dana tersedia Output - Hasil Review Laporan Keuangan Outcomes - Laporan keuangan sesuai standar akuntansi	Rupiah LHR %	77,122,800.00 1 100

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No.	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					10.	Evaluasi LAKIP.	Input - Dana tersedia	Rupiah	408,415,000.00
							Output - Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	LHE	42
							Outcomes - Terukurnya kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sintang	%	100
					11.	Pemeliharaan program SIM-HP	Input - Dana tersedia	Rupiah	6,000,000.00
							Output - Terpeliharanya program SIM-HP	Aplikasi	1
							Outcomes - Data dan informasi yang akurat	%	100
					12.	Inventarisasi penetapan TPTGR	Input - Dana tersedia	Rupiah	89,130,600.00
							Output - Terlaksananya Laporan Inventarisasi TP/TGR	Dokumen	5
							Outcomes - Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	%	100
					13.	Review RKA SKPD	Input - Dana tersedia	Rupiah	38,788,400.00
							Output - Hasil Review RKA	LHR	1
							RKA SKPD sesuai	%	100

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							standar akuntansi		
					14.	Pencanangan Zona Integritas	Input Dana tersedia	Rupiah	78,974,000.00
							Output Dokumen Pencanangan Zona Integritas dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Resiko	LHE	5
							Outcomes Ditetapkannya WBK/WBBM	%	100
					15.	Sapu Bersih Pungutan Liar	Input Dana tersedia	Rupiah	90,360,000.00
							Output Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Sintang	Laporan	1
							Outcomes Tidak adanya Pungutan Liar di Kabupaten Sintang	%	100
					16.	Probity Audit	Input Dana tersedia	Rupiah	43,595,700.00
							Output Laporan Probity Audit Kabupaten Sintang	LHA	4
							Outcomes Tersedianya Keyakinan yang objektif mengenai pengadaan barang dan jasa	%	100
					17.	Penanganan	Input		

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Gratifikasi	Dana tersedia Output Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Rupiah Laporan	97,919,700.00 1
						18. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Outcomes Tertanganinya Laporan Gratifikasi Input Dana tersedia Output Laporan Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang	% Rupiah Laporan	100 34,403,700.00 1
						19. Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP	Outcomes Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sintang Input Dana tersedia Output Laporan Penerapan SPIP Kabupaten Sintang	% Rupiah Laporan	100 38,848,000.00 1
						20. Laporan LHKPN/ LHKASN	Outcomes Terlaksananya Pengawasan Intern di Pemerintah Input Dana tersedia Output Jumlah Laporan LHKPN/ LHKASN	% Rupiah Laporan	100 98,811,000.00 1
							Outcomes Tersedianya Laporan ASN tentang harta dan kekayaan	%	100

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					21.	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N!)	Input Dana tersedia Output Informasi pengaduan melalui media online Outcomes Tersedianya data hasil pengolahan aduan masyarakat terintegrasi dengan sistem online Inspektorat	Rupiah % %	274,934,100.00 30 100
					22.	Audit Manajemen Kepegawaian	Input Dana tersedia Output Laporan Audit Kepegawaian Kabupaten Sintang Outcomes Tersedianya keyakinan secara terbatas mengenai audit kepegawaian	Rupiah Laporan %	38,595,700.00 1 100
					23.	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	Input Dana tersedia Output Laporan Audit Sistem Informasi Outcomes Tersedianya keyakinan secara terbatas mengenai sistem informasi	Rupiah Laporan %	38,595,700.00 1 100
					24.	Pengawasan Dana Bantuan Operasional	Input Dana tersedia	Rupiah	199,420,000.00

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sekolah (BOS)	Output Jumlah Obyek Pemeriksaan Dana BOS	Sekolah	40
							Outcomes Terlaksananya Pengawasan Dana BOS di Kabupaten Sintang	%	100
					25.	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Input Dana tersedia	Rupiah	200,000,000.00
							Output Dana DAK yang diperiksa	Laporan	60
							Outcomes Terlaksananya Pengawasan DAK di Kabupaten Sintang	%	100
					26.	Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019	Input Dana tersedia	Rupiah	164,925,000.00
							Output Jumlah Laporan Hasil Audit DAK Kabupaten Sintang	Dokumen	1
							Outcomes Terlaksananya Audit Dana DAK Fisik TA 2019	%	100
					27.	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Input Dana tersedia	Rupiah	99,679,400.00
							Output Jumlah Laporan Hasil Reviu	Dokumen	1
							Outcomes		

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Terlaksananya Reviu RPJMD dan RKPD	%	100
	Tersedianya tenaga struktural dan Auditor/Pemeriksa yang lulus dan mengikuti Diklat Sertifikasi JFA, Diklat Struktural,	- Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga Auditor dan Aparat Pengawas - Meningkatnya kualitas kinerja tenaga struktural	100%	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Input - Dana tersedia Output - Peserta Diklat - Outcomes Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat	Rupiah Orang Orang %	181,250,000.00 11 100
					2.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.	- Dana tersedia Output - pegawai yang mengikuti pelatihan teknis Outcomes - Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti diklat	Rupiah Orang %	369,930,000.00 22 100
					3	Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	- Dana tersedia Output - peserta Deiklat PKS Outcomes - Hasil pemeriksaan sesuai standar	Rupiah Orang %	202,454,320.00 70 100
					4	Pelaksanaan Penguatan Kapabilitas APIP	- Dana tersedia	Rupiah	26,289,900.00

SASARAN				KEGIATAN					
No.	Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)	PROGRAM	No	Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan	- Kebijakan Pengawasan - Laporan pengawasan	100%	7 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Input - Dana tersedia Output - Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Outcomes - Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur	Rupiah Kebijakan %	1,961,800.00 2 100
					2	Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan Semesteran dan Tahunan.	Input - Dana tersedia Output - Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan Outcomes - Tersedianya laporan realisasi pelaksanaan program	Rupiah Laporan %	2,256,000.00 2 100
8	Peingatan Hari Besar Daerah dan Nasional	- Pameran Pembangunan - Hari Jadi Kota Sintang	100%	8 Peingatan Hari Besar Daerah dan Nasional	1	Pameran Pembangunan	Input - Dana tersedia Output - Jumlah Kegiatan Pameran Yang Diikuti Outcomes - Terlaksananya Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional	Rupiah Kegiatan %	2,256,000.00 2 100
JUMLAH TOTAL									7,969,683,800.00

PEMBAGIAN PERSONIL BIDANG III

No	BIDANG I	No	BIDANG II	No	BIDANG IV
1.	SAMPE RITONGA, SE	1.	MISNO, S,Sos	1.	Y. MURWANTO, ST
2.	RUPINA SANTI, SE	2.	SUPRIADI, S.Hut	2.	SURI, SP
3.	H.MUKTI RAMA UTOMO, SE,MM	3.	RANCANG, S.Sos	3.	H. WIDODO. S.Sos, MM
4.	ITA PERMASUSANTI, SE			4.	ELSA ADELINA LINGGA,S.IP